



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 06 Januari 2020

Halaman: 10

PELAYAN MASYARAKAT

## Nominal Honor Masih Abu-Abu

JOGJA—Nominal pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat, termasuk di antaranya Ketua RT dan RW di Kota Jogja yang berlaku mulai Januari 2020 belum jelas. Kendati sudah dipastikan ada anggaran untuk honor tersebut, namun hingga kini nominalnya masih menunggu hasil kalkulasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Jogja.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengaku telah mengusulkan sejumlah nominal setiap jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat. Namun usulan itu saat ini masih dalam proses di TPAD Kota Jogja.

Dia mengatakan Bagian Tata Pemerintahan mengajukan usulan berdasar tingkatan kewilayahan saja dengan melihat perbandingan stimulan administrasi setiap RT dan RW. "Yang sebelumnya ada di belanja hibahnya kecamatan," katanya, akhir pekan lalu.

Pemberian honorarium, kata dia, didasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.72/2019 tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat. "Tujuannya untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas warga pelayan masyarakat. Ini untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga pelayan masyarakat," katanya.

Adapun mekanisme proses penyaluran honorarium yakni hampir sama seperti anggaran belanja langsung. Pihaknya hanya tinggal menunggu angkanya saja dari TPAD yang kemudian akan dimasukkan dalam keputusan Wali Kota yang berisi tentang penetapan besaran nominal honorarium yang diterima kepada jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat. "Kalau rencananya, pencairan honorarium itu dilakukan tiap semester atau dua kali dalam setahun," kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut dipastikan legal lantaran memiliki landasan hukum yang jelas. Adapun soal besaran honor, dia berharap nantinya TPAD mempertimbangkan kemampuan daerah. "Karena kami [Bagian Tata Pemerintahan] menyerahkan besarannya ke TPAD. Sesuai kemampuan keuangan saja. Kalau susah, baru kami buat keputusan wali kota untuk penetapan besaran honorariumnya," kata dia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa mengatakan pihaknya belum dapat menyebutkan nominal honorarium ini. Saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi APBD oleh Gubernur DIY. "Mungkin Selasa kami informasikan lagi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi mengatakan peran pengurus Ketua RT/RW, Ketua Pengurus Kampung, Ketua LPMK, dan Ketua Tim Penggerak PKK terbilang cukup sentral, khususnya bagi pengimplementasian program-program pemerintah.

Pasalnya para pelayan masyarakat tersebut yang lebih memahami soal seluk beluk permasalahan yang ada di masyarakat. "Jadi implementasi program pemerintahan, bisa dibilang sangat mengandalkan para pelayan masyarakat itu," ucap Heroe. (Lugas Subarkah)

**WARGA PELAYAN MASYARAKAT PENERIMA HONOR**

- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- Ketua pengurus kampung
- Ketua RW
- Ketua RT
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat RW
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat RT

Sumber: Perwal Jogja No.72/2019

| Instansi                  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Tapem dan Kesra | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005